

**ALTERNATIF KEBIJAKAN EKONOMI
BAGI GRANDDESIGN PEMBANGUNAN EKONOMI KABUPATEN CIAMIS**

Oleh

Yuhka Sundaya dan Atih R. Dariah

Program Studi Ilmu Ekonomi Universitas Islam Bandung

Abstract

The purpose of this article is to analyze the economy Ciamis District of West Java Province to identify alternative economic development policies are needed. The analysis using a descriptive approach to understanding the economy through secondary data. Based on the analysis of macroeconomic variability Ciamis District, there are two alternative economic policies that are conceptually can anticipate regional economic disparities. Consideration of policy alternatives are (1) rural industrialization, and (2) the development of regional tourism. The concept of rural industrialization is developing a type of manufacturing industry where production activities to use local agricultural raw materials, both of which have developed agriculture and farming activities to be developed. Potential of the agricultural sector in the Ciamis District sub-sectors: (1) food crops, (2) plantation, (3) community forests, and (4) of aquaculture and marine fisheries.

Keywords :JEL 021. Planning Models; Planning Policy

1. Pendahuluan

Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJP Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2005 tentang RPJM Nasional Tahun 2004 – 2009, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang RPJP Daerah Jawa Barat Tahun 2005 - 2025, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 tahun 2009 tentang RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 - 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 tahun 2009 tentang RPJP Daerah Kabupaten Ciamis, serta Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2009 tentang RPJM Daerah Kabupaten Ciamis; berbagai upaya penyempurnaan perencanaan pembangunan di Kabupaten

Ciamis terus dilakukan. Kita masih perlu memperbaiki arah kebijakan pembangunan ke depan dalam bentuk grand design yang akan menjadi pegangan bersama kebijakan pembangunan ekonomi dalam jangka menengah.

Grand Design Pembangunan Ekonomi dapat menjadi dokumen yang saling mengisi antara dokumen RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Ciamis. Kedua dokumen tersebut saling mengikat, merupakan bagian yang terintegrasi, dan tidak terpisah. Kesenambungan perencanaan pembangunan ekonomi dalam setiap periode lima tahunan dapat terjaga dan menjadi rujukan atau acuan dalam menyusun rencana pembangunan ekonomi setiap periode kepemimpinan kepala daerah terpilih.

Grand Design Pembangunan Ekonomi merupakan visi-misi pembangunan ekonomi daerah yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi dalam jangka menengah dengan berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh daerah di masa depan. Berbeda dengan RPJMD, di dalam grand design dikemukakan kebijakan dan program yang dirancang secara per tahun hingga 5 tahun mendatang, yang berisi kebijakan/program, indikator dan capaiannya (*road map*) yang menunjang transparansi dan akuntabilitas pekerjaan Pemerintah Daerah. Diharapkan dengan memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas tersebut, dapat memancing respon para pemangku kepentingan pembangunan yang tentunya menjadi searah dengan kebijakan Pemerintah Daerah.

Penyusunan Grand Design Pembangunan Ekonomi Kabupaten Ciamis telah menghasilkan beberapa draft sebagai hasil dari tahapan proses perumusan. Hasil perumusan terakhir menetapkan bahwa Grand Design ini terdiri dari empat bagian utama. Bagian pertama berisi konsistensi Grand Design dengan dokumen rencana pembangunan lainnya, baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bagian ini disajikan untuk memberikan informasi tertulis kepada para masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya bahwa kegiatan

pembangunan ekonomi di Kabupaten Ciamis menghindari bentrokan dengan dokumen perencanaan lainnya. Bagian kedua berisi keragaan makroekonomi Kabupaten Ciamis. Bagian ini menjelaskan dan menganalisis masalah ekonomi di Kabupaten Ciamis. Penjelasan pada bagian ini menunjang perumusan sintesa masalah pembangunan ekonomi Kabupaten Ciamis, yang nantinya akan disajikan pada bagian tiga. Kemudian, sintesa masalah ekonomi tersebut akan membantu tim perumus di dalam merancang alternatif kebijakan untuk mengatasinya. Materi ini akan disajikan pada bagian keempat. Selanjutnya, hasil akhir alternatif kebijakan terhadap indikator makroekonomi Kabupaten Ciamis akan diilustrasikan secara kuantitatif dengan menggunakan model ekonomi yang cocok. Materi ini disajikan pada bagian kelima. Pada bagian ini akan ditampilkan bagaimana dampak alternatif kebijakan yang telah dirumuskan terhadap perubahan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, kebutuhan investasi dan potensi penerimaan pemerintah untuk menunjang kegiatan pembangunan ekonomi.

Penyusunan Grand Design Pembangunan Ekonomi memerlukan asupan data yang akurat dan terkini. Proses penyusunan draft yang telah dilakukan masih berbasis pada data sekunder. Tentu saja asupan

data tersebut masih belum lengkap. Oleh karena itu, melalui majelis focus grouped discuss ini, diharapkan akan terdapat banyak informasi empiris yang nantinya akan memperkaya asupan data bagi penyempurnaan Draft Grand Design Pembangunan Ekonomi Kabupaten Ciamis.

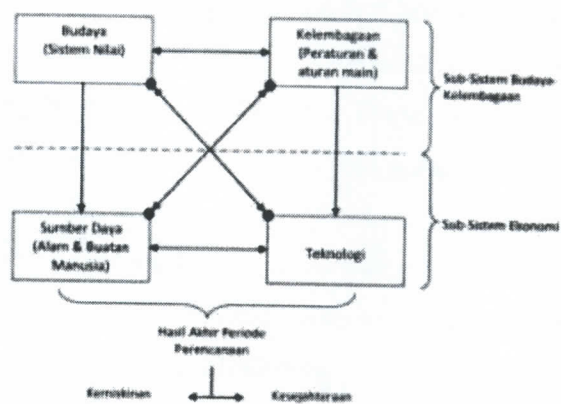
Artikel ini menampilkan ringkasan dari pekerjaan yang telah dilakukan oleh tim pekerja yang telah dilakukan oleh tim perumus. Pada bagian berikutnya disajikan beberapa materi mengenai kerangka pembangunan ekonomi, keragaan makroekonomi Kabupaten Ciamis, dan alternatif kebijakan pembangunan ekonomi. Alternatif kebijakan tersebut sifatnya masih tentatif dan hanya didasarkan pada asupan data sekunder.

2. Kerangka Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan upaya pemerintah untuk mengintrodusir sistem sosial di Kabupaten Ciamis. Karena itu, pemahaman awal mengenai sistem sosial tersebut sangatlah diperlukan. Menurut Hayami (2000), sistem sosial tersebut digerakan oleh dua sub sistem yang saling berinteraksi, yaitu sub sistem budaya-kelembagaan dan sub sistem ekonomi. Hubungannya diilustrasikan melalui Gambar 1.

Dalam abstraksi sistem sosial tersebut, sub-sistem ekonomi dipayungi oleh sub-sistem

budaya-kelembagaan. Sub-sistem budaya yang dimaksud adalah sistem nilai yang dianut oleh masyarakat lokal, sedangkan sub-sistem kelembagaan mencakup peraturan terkait pembangunan ekonomi dan struktur pasar output (barang dan jasa) dan struktur pasar input (tenaga kerja dan input produksi lainnya). Sub-sistem ekonomi dikendalikan oleh sub-sistem budaya-kelembagaan. Karena itu, untuk membelokan kondisi keterbelakangan, kuncinya adalah mengkreasi kebijakan pemerintah agar tercipta kelembagaan yang mampu mengeliminir katup-katup yang membuat sistem ekonomi tidak bekerja secara optimal.



Gambar 1. Sistem Sosial Masyarakat

Sumber : Hayami, 2000, dimodifikasi

Salah satu kendala yang dihadapi Kabupaten Ciamis, dan umumnya oleh ekonomi yang sedang berkembang, adalah ketidaksempurnaan pada pasar output dan pasar input. Keterpencilan lokasi produksi pertanian,

misalnya, merupakan salah satu bentuk ketidaksempurnaan pasar yang kemudian bisa menimbulkan pintu penghalan bagi petani untuk merespon perkembangan pasar, baik domestik, regional maupun internasional. Contoh lain ketidaksempurnaan pasar misalnya adalah monopoli pemilik lahan terhadap pekerja penggarap pertanian. Miringnya kekuatan ekonomi pada pemilik lahan, menurut Bashu (2002) bisa menutup upaya inovasi pekerja penggarap terhadap lahan pertaniannya.

Sumber daya dan teknologi, sifatnya saling melengkapi. Sumber daya mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan manusia, termasuk infrastruktur yang dibangun oleh Pemerintah Daerah untuk menunjang perkembangan ekonomi yang kondusif. Sedangkan teknologi adalah cara-cara yang digunakan untuk mengolah sumber daya menjadi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat domestik, regional dan internasional. Skema kebijakan dalam grand design pembangunan ekonomi Jawa Barat dalam hal ini memiliki potensi untuk mengembangkan sistem ekonomi di Kabupaten Ciamis.

Terdapat dua kemungkinan hasil dari bekerjanya sistem sosial tersebut, yaitu menuju kemiskinan atukah menuju kesejahteraan. Karena itu, kunci atau pra-kondisi agar sub-sistem ekonomi menghasilkan kesejahteraan

adalah mengevaluasi dan mengoreksi aspek kelembagaan yang berlaku di Kabupaten Ciamis. Kelembagaan lokal harus diciptakan agar mampu merangsang para pelaku ekonomi lokal dapat merespon perkembangan pasar dan mendorong tumbuh dan berkembangnya inovasi produksi. Hasil akhirnya berpotensi besar untuk menyerap angkatan kerja lokal dan tentunya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Paska Bupati terpilih, Kabupaten Ciamis telah menetapkan visi yang menyemangati masyarakatnya, yaitu "Dengan Iman dan Taqwa, Ciamis Mantap Sejahtera Tahun 2014". Kata "Iman" dan "Taqwa" tidak bisa diremehkan, dan tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang jauh dari kegiatan pembangunan ekonomi. Kedua kata tersebut memiliki daya persuasi untuk mengarahkan sistem nilai masyarakat Kabupaten Ciamis kepada tindakan ekonomi yang menimbulkan efek limpahan negatif bagi pihak lainnya.

Iman dan taqwa sangatlah menunjang pembangunan ekonomi, dan membuatnya bekerja lebih efisien. Iman dan taqwa akan menambah berat bobot pertimbangan moral dan sosial dalam tata kehidupan sosial-ekonomi. Keimanan dan ketaqwaan merupakan mekanisme *self-regulated* yang mengantisipasi individu dan masyarakat dari tindakan sosial-ekonomi-politik yang menimbulkan

eksternalitas negatif bagi masyarakat. Keimanan dan ketaqwaan yang rendah akan menimbulkan tingkat kejahatan yang tinggi, termasuk kejahatan ekonomi atau kegiatan ekonomi ilegal. Konsekuensinya adalah akan menimbulkan biaya yang besar dalam aspek *monitoring-surveillance-controlling* (MSC) yang sangat besar sebagai bagian dari upaya penegakan hukum yang terkait dengan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Inilah yang dimaksud, bahwa keimanan dan ketaqwaan yang dalam akan menciptakan proses pembangunan ekonomi yang efisien dan efektif. Karena itu, upaya *moralsuasion* para tokoh agama dan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan ekonomi. Para tokoh agama dan masyarakat memiliki potensi besar untuk memperbaiki sistem nilai yang berkembang di masyarakat.

3. Keragaan Makroekonomi Kabupaten Ciamis

Keragaan atau kinerja makroekonomi menampilkan bagaimana perkembangan ekonomi dan bagaimana implikasinya. Keragaan makroekonomi dapat dilihat dari beberapa indikator seperti : laju pertumbuhan ekonomi (LPE), pendapatan per kapita, inflasi, pengangguran, daya beli, dan penduduk miskin.

Laju pertumbuhan ekonomi menampilkan angka perubahan output seluruh

lapangan usaha yang berkembang di Kabupaten Ciamis dari tahun ke tahun. Dari tahun 2004 hingga 2008, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ciamis cenderung mengalami peningkatan. Data ini menunjukkan bahwa output semua lapangan usaha cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dari sektor pertanian hingga jasa-jasa. Pada tahun 2008, LPE tercatat sebesar 4,8 persen. Artinya, output semua lapangan usaha meningkat sebesar 4,8 persen dibandingkan tahun 2007.

Kabupaten Ciamis termasuk ke dalam daerah pertanian. Dilihat dari struktur ekonominya tampak bahwa output terbesar dari Kabupaten Ciamis adalah output sektor pertanian. Di dalam struktur PDRB tahun 2008 kontribusinya sebesar 31,2 persen. Kontribusi output sektor manufaktur tampak rendah. Pada tahun 2008 kontribusinya sebesar 6,53 persen. Sementara itu, kontribusi sektor perdagangan berada di bawah sektor pertanian. Pada tahun 2008 kontribusi sektor perdagangan sebesar 25,64 persen.

Mencermati perkembangan output setiap sektor tampak bahwa yang mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ciamis adalah sektor perdagangan. Meskipun sektor pertanian memiliki kontribusi terbesar dalam PDRB, tapi perkembangannya cenderung mengalami penurunan. Perkembangan ini memberikan sinyal yang kurang baik terhadap

perkembangan indikator makroekonomi daerah. Terdapat gejala bahwa antar lapangan usaha memiliki keterkaitan yang kurang kuat dalam hubungan saling pasok input dan output.

Selanjutnya berdasarkan analisis *multiplier effect* input – output terdapat beberapa ciri hubungan ekonomi antar lapangan usaha di Kabupaten Ciamis. Seperti ditampilkan pada Tabel 1, tampak bahwa,

- (1) Pertumbuhan output pada sektor pertanian berpotensi besar untuk mendorong pertumbuhan output industri manufaktur dan perdagangan;
 - (2) Pertumbuhan output pada sektor manufaktur potensinya kecil untuk mendorong pertumbuhan output pertanian. Pertumbuhan output sektor manufaktur berpotensi besar untuk mendorong pertumbuhan output sektor listrik-gas-air bersih dan bangunan;
 - (3) Pertumbuhan sektor perdagangan potensinya kecil untuk mendorong pertumbuhan output pertanian. Pertumbuhan output sektor perdagangan berpotensi besar untuk mendorong pertumbuhan output sektor manufaktur dan kegiatan pengangkutan-komunikasi
- Sepintas tampak bahwa perkembangan pada sektor perdagangan dan manufaktur tidak memberikan pengaruh yang cukup berarti bagi perkembangan output sektor pertanian. Padahal

sebagian besar penduduk Kabupaten Ciamis bekerja pada sektor tersebut. Analisa tersebut menunjukkan bahwa sektor perdagangan dan manufaktur yang berkembang selama ini tidak memanfaatkan secara optimal bahan baku pertanian yang dihasilkan oleh para petani Ciamis, atau sebaliknya, sektor pertanian kurang mampu memenuhi kriteria bahan baku pertanian yang dibutuhkan oleh sektor manufaktur dan perdagangan.

Tabel 1. Multiplier Effect Input-Output, Kabupaten Ciamis, 2002, Juta Rupiah

Sektor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total MO
1	1.04	0.01	0.27	0.10	0.09	0.23	0.09	0.05	0.10	2.00
2	0.00	1.04	0.02	0.12	0.03	0.00	0.00	0.01	0.01	1.23
3	0.03	0.03	1.13	0.30	0.18	0.07	0.13	0.07	0.25	2.20
4	0.00	0.00	0.01	1.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	1.09
5	0.01	0.03	0.02	0.09	1.05	0.04	0.07	0.14	0.07	1.52
6	0.03	0.03	0.18	0.20	0.16	1.24	0.34	0.16	0.19	2.53
7	0.03	0.04	0.11	0.13	0.09	0.15	1.18	0.09	0.10	1.91
8	0.01	0.06	0.03	0.10	0.23	0.08	0.07	1.14	0.09	1.80
9	0.01	0.02	0.03	0.05	0.03	0.06	0.22	0.06	1.25	1.75

Sumber : Tabel Input – Output Kabupaten Ciamis, 2002

Keterangan : MO = multiplier output

- 1 = pertanian
- 2 = penggalian
- 3 = industri pengolahan (manufacturing)
- 4 = listrik, gas dan air bersih
- 5 = bangunan
- 6 = perdagangan, hotel dan restoran
- 7 = pengangkutan dan komunikasi

8 = keuangan, persewaan dan jasa perusahaan

9 = jasa-jasa

MO pada baris pertanian (1) menunjukkan bahwa setiap kenaikan output pertanian sebesar 1 juta rupiah, akan berpotensi untuk meningkatkan PDRB sebesar 2 juta rupiah. Angka tersebut tersebar pada sektor pertanian sendiri hingga sektor jasa-jasa. Pada baris yang sama terlihat bahwa perkembangan output pertanian sesungguhnya memiliki potensi yang cukup besar untuk mendorong kenaikan output sektor manufaktur (3) dan perdagangan (6). Kenaikan output sektor pertanian sebesar 1 juta rupiah berpotensi untuk meningkatkan output sektor manufaktur dan perdagangan masing-masing sebesar 270 ribu rupiah dan 230 ribu rupiah.

Sementara itu pada baris industri manufaktur (3), tampak bahwa setiap kenaikan output sektor itu sebesar 1 juta rupiah, berpotensi untuk meningkatkan PDRB sebesar 2,2 juta rupiah. Pada baris yang sama terlihat bahwa perkembangan output sektor manufaktur memiliki potensi yang cukup besar untuk mendorong output sektor bangunan (4) dan jasa-jasa (9). Kenaikan output sektor manufaktur sebesar 1 juta rupiah, berpotensi untuk meningkatkan output sektor bangunan dan jasa-jasa masing – masing sebesar 300 ribu dan 250 ribu rupiah.

Analisis tersebut menampilkan informasi bahwa antara sektor manufaktur dan pertanian tidak terdapat hubungan yang kuat. Ke depan, hubungan kedua sektor tersebut harus dipererat. Pemikiran ini bersumber pada argumen bahwa perekonomian yang kuat dan mantap dicirikan oleh adanya keterkaitan yang sangat kuat antar lapangan usaha. Sehingga perkembangan pada suatu lapangan usaha akan memberikan perkembangan yang searah pada lapangan usaha lainnya.

Gejala interaksi ekonomi seperti itu harus diantisipasi. Pengalaman pada banyak perekonomian, bila perkembangan sektor manufaktur tidak searah dengan sektor pertanian, implikasi ekonominya besar. Impor bahan baku pertanian akan besar dan meningkat dalam jangka waktu tertentu, dan pada akhirnya kekuatan ekonomi daerah akan terancam rapuh. Perekonomian yang kuat dicirikan oleh adanya keterkaitan transaksi ekonomi yang intensif pada setiap lapangan usaha. Disamping itu, karena tekanan penduduk lebih besar berada di sektor pertanian, muncul kekhawatiran adanya kesenjangan ekonomi antara pekerja di sektor manufaktur dengan sektor pertanian dan kesenjangan ekonomi antara pedesaan dengan daerah kota.

Kenaikan LPE terkait juga dengan beberapa indikator penting lainnya, yaitu pendapatan masyarakat, kesempatan kerja dan

pasar hasil produksi setiap lapangan usaha. Oleh karena itu tidak mengherankan bahwa kenaikan LPE di Kabupaten Ciamis disertai oleh kenaikan dalam pendapatan per kapita masyarakat dan daya belinya. Daya beli mencerminkan kemampuan setiap individu untuk membeli barang dan jasa yang tersedia di pasar. Daya beli masyarakat lokal juga memiliki pengaruh pada perkembangan PDRB. Daya beli merupakan sumber permintaan terhadap barang dan jasa. Meskipun daya beli masyarakat Kabupaten Ciamis cenderung meningkat, tapi peningkatannya cenderung melambat. Data ini memberikan sinyal bahwa pertumbuhan ekonomi ke depan juga tidak akan terlalu meningkat tajam, dengan asumsi tidak terjadi perkembangan yang berarti pada pertumbuhan permintaan di luar Kabupaten Ciamis.

Berikutnya, kenaikan LPE juga memberikan sinyal perkembangan input produksi yang digunakan oleh setiap lapangan usaha, dan sinyal perkembangan permintaan pasar. Secara umum, dipahami bahwa kenaikan output suatu lapangan usaha, utamanya bersumber dari kinerja pekerjanya dan upaya pengembangan usaha melalui kegiatan investasi. Sedangkan dari sisi pasar, kenaikan LPE memberikan sinyal adanya kenaikan permintaan beragam barang dan jasa di pasar lokal maupun di luar daerah terhadap barang

dan jasa yang dihasilkan oleh lapangan usaha yang berkembang di Kabupaten Ciamis.

Meskipun demikian, sekilas tampak bahwa lapangan usaha yang berkembang belum sepenuhnya mampu menyerap angkatan kerja. Disamping terjadi penyerapan tenaga kerja sebagai akibat dari kenaikan LPE, pada pihak lain jumlah pengangguran juga cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 jumlah pengangguran tercatat sebanyak 97 485 orang. Dalam dinamika pasar tenaga kerja seringkali terdapat informasi yang asimetri atau tidak cocok antara kualifikasi pekerja yang dibutuhkan oleh lapangan usaha dengan kualifikasi yang dimiliki oleh setiap calon pekerja. Lebih dari itu, asimetri informasi pasar kerja juga bisa terjadi karena tidak tersebar luasnya informasi lowongan kerja. Oleh karena itu, disamping menciptakan iklim usaha yang menunjang kegiatan ekonomi, Pemerintah Daerah juga perlu mencurahkan konsentrasinya untuk meminimalisir asimetri informasi pada pasar kerja.

Selanjutnya, dibalik kenaikan LPE juga tersirat kekhawatiran meningkatkan jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin cenderung mengalami peningkatan di Kabupaten Ciamis. Pada tahun 2008 jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 349 464 jiwa atau sekitar 23 persen dari populasi penduduk. Kemudian, dilaporkan juga bahwa permintaan

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari masyarakat meningkat (Pikiran Rakyat, 13/11/2009). SKTM tersebut digunakan untuk mengakses layanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis (RSUD). Ini memberikan kekhawatiran akan meningkatnya jumlah penduduk miskin pada tahun mendatang.

Tampaknya, sebagian besar penduduk miskin tersebut bekerja pada lapangan usaha pertanian. Bila demikian adanya, maka gejala meningkatnya penduduk miskin semakin menguat bila dikaitkan dengan adanya kecenderungan penurunan pada output sektor pertanian.

Analisa diatas memberikan argumentasi bahwa kenaikan LPE belum mencerminkan kualitas yang diharapkan. Terdapat gejala dimana kenaikan LPE diikuti oleh kenaikan jumlah penduduk miskin. Sepintas, masalahnya terletak pada struktur ekonomi yang tidak kuat. Hubungan ekonomi antar lapangan usaha tampak tidak terikat kuat. Bila gejala ini tidak segera diubah, maka ketimpangan ekonomi antara desa dengan kota serta pertanian dan industri dikhawatirkan akan semakin besar. Masalah makroekonomi regional ini perlu dipertimbangkan sebagai asupan untuk merumuskan alternatif kebijakan di dalam *Grand Design* Pembangunan Ekonomi Kabupaten Ciamis ke depan.

4. Alternatif Kebijakan Pembangunan Ekonomi

Berdasarkan analisa terhadap keragaan makroekonomi Kabupaten Ciamis, terdapat dua alternatif kebijakan ekonomi yang secara konseptual dapat mengantisipasi ketimpangan ekonomi daerah. Pertimbangan alternatif kebijakan tersebut adalah,

- (1) Industrialisasi pedesaan; dan
- (2) Pengembangan pariwisata daerah

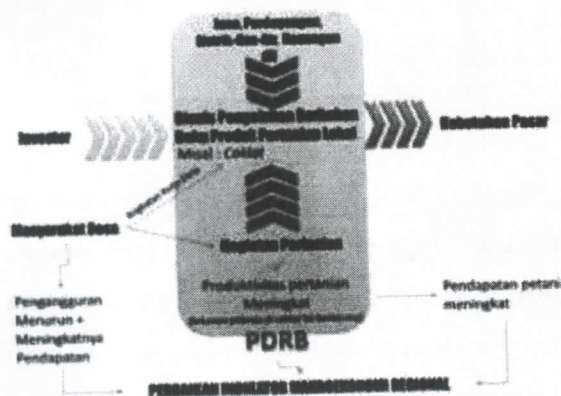
Konsep industrialisasi pedesaan tersebut mengembangkan jenis industri manufaktur yang mana kegiatan produksinya menggunakan bahan baku pertanian lokal, baik dari pertanian yang telah berkembang maupun kegiatan pertanian yang akan dikembangkan. Potensi sektor pertanian Kabupaten Ciamis tersebut pada sub sektor :

- (1) Tanaman pangan
- (2) Perkebunan
- (3) Hutan rakyat
- (4) Perikanan budidaya dan perikanan laut

Jenis industri pengolahan yang baru terlihat prospektif adalah pengolahan coklat (*cocoa*). Dari aspek sumber daya lahan, Kabupaten Ciamis memiliki kemampuan yang cocok untuk pertumbuhan tanaman coklat. Sementara itu permintaan coklat di pasar luar menunjukkan prospek yang menguntungkan.

Pengembangan jenis industri ini dapat memperkuat keterkaitan sektor industri manufaktur dengan pertanian. Lebih dari itu, strategi industrialisasi pedesaan ini memiliki potensi untuk memperbaiki indikator makroekonomi Kabupaten Ciamis. Penjelasannya dapat ditelusuri dari ilustrasi skema kebijakannya.

Skema kebijakan industrialisasi pedesaan diilustrasikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Skema Industrialisasi Pedesaan dan Indikator Makroekonomi Regional

Kata kunci industrialisasi tersebut adalah bisnis pengolahan berbahan baku produk pertanian lokal. Langkah awal untuk memulai industrialisasi tersebut terletak pada pengelolaan investasi daerah (Penanaman Modal Daerah). Langkah ini bisa bermula dari pihak swasta atau diinisiasi oleh Pemerintah Daerah. Pra kondisi untuk mengawali langkah tersebut adalah tersusunnya profil investasi daerah berbasis bahan baku lokal. Di dalam profil tersebut tersaji informasi *profitabilitas*,

reliabilitas dan *feasibilitas* pengembangan usaha. Dokumen seperti itu akan memudahkan pembuatan keputusan calon investor. Pra kondisi berikutnya adalah terciptanya prosedur investasi yang sederhana supaya pengambilan keputusan investor tidak terganggu.

Pelaksanaan industrialisasi pedesaan tersebut berpotensi untuk memperbaiki indikator makroekonomi regional. Kegiatan industri berbahan baku lokal tersebut memiliki dua implikasi ekonomi : (1) penyerapan angkatan kerja desa dan penyerapan output sektor pertanian desa. Sebagian masyarakat desa akan bekerja di sektor pengolahan tersebut, sehingga tekanan terhadap lahan pertanian akan berkurang. Berkurangnya tekanan terhadap kegiatan pertanian berpotensi untuk meningkatkan produktivitas petani. Output per orang petani akan meningkat dan mengarah pada meningkatnya pendapatan mereka. Selanjutnya, angkatan kerja desa yang terserap pada industri manufaktur akan memberikan tambahan pendapatan bagi penduduk desa.

Seiring dengan perkembangan industri manufaktur berbahan baku pertanian lokal, jenis kegiatan ekonomi lainnya akan turut berkembang. Kegiatan perdagangan, jasa pengangkutan, dan keuangan diperkirakan akan turut berkembang seiring dengan intensifnya hubungan ekonomi industri manufaktur tersebut

dengan sektor pertanian lokal. Pada akhirnya, interaksi ekonomi ini akan meningkatkan PDRB Kabupaten Ciamis.

Sejalan dengan industrialisasi pedesaan, alternatif kebijakan lainnya adalah pengembangan sektor pariwisata. Berdasarkan laporan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, tercatat bahwa Kabupaten Ciamis memiliki 173 situs sejarah. Jumlah ini paling banyak dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat. Pengembangan potensi wisata tersebut dapat mengantisipasi jenuhnya sektor pariwisata Kabupaten Ciamis yang selama ini masih terkonsentrasi di Pangandaran.

Potensi keragaman wisata dan budaya tersebut dapat mendorong tumbuhnya lapangan usaha baru di daerah wisata yang akan dikembangkan. Biasanya kegiatan di daerah wisata akan diikuti oleh tumbuhnya industri kerajinan serta kegiatan perdagangan dan penginapan. Melalui pengembangan pariwisata, masyarakat desa memiliki peluang tambahan pekerjaan baru dan tentu saja memiliki kesempatan untuk meningkatkan pendapatannya.

Kedua alternatif kebijakan tersebut dapat ditunjang oleh perbaikan sarana dan prasaran atau infrastruktur daerah. Oleh karena itu, rencana pengembangan infrastruktur daerah harus diarahkan untuk menunjang industrialisasi pedesaan dan pengembangan

pariwisata. Ketersediaan infrastruktur tersebut akan menambah kepercayaan diri bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan promosi ke luar, dengan harapan akan muncul daya tarik yang luar biasa terhadap Kabupaten Ciamis.

5. Simpulan dan Saran

Simpulan yang diturunkan dari hasil analisis terhadap keragaan makroekonomi Kabupaten Ciamis adalah :

- (1) Terdapat dua alternatif kebijakan ekonomi yang secara konseptual dapat mengantisipasi ketimpangan ekonomi daerah, yaitu (1) industrialisasi pedesaan; dan (2) pengembangan pariwisata daerah.
- (2) Konsep industrialisasi pedesaan diarahkan untuk mengembangkan jenis industri manufaktur dengan menggunakan bahan baku pertanian lokal, baik dari pertanian yang telah berkembang maupun kegiatan pertanian yang akan dikembangkan.
- (3) Potensi sektor pertanian Kabupaten Ciamis tersebut berada pada sub sektor :
 - (1) Tanaman pangan, (2) Perkebunan, (3) Hutan rakyat, dan (4) Perikanan budidaya dan perikanan laut.

Berdasarkan pengetahuan tersebut, sebaiknya pemerintah daerah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Menempatkan kebijakan industrialisasi pedesaan dan pengembangan pariwisata

daerah ke dalam *grand design* atau rencana induk pembangunan ekonomi Kabupaten Ciamis

(2) Menyusun *blue print* dan *road map* untuk mempersiapkan alternatif kebijakan pembangunan ekonomi tersebut untuk disosialisasikan kepada stakeholder pembangunan ekonomi di Kabupaten Ciamis.

(3) Mengalokasikan anggaran penerimaan dan belanja pembangunan untuk pembiayaan alternatif kebijakan pembangunan ekonomi yang telah disimpulkan.

6. Referensi

- BPS. 2002. Tabel Input – Output Kabupaten Ciamis Tahun 2002.
- Hayami, Y, and Godo, Y. 2005. *Development Economics : From the Poverty to the Wealth of Nations*. Third Edition. Oxford University Press.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJP Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2005 tentang RPJM Nasional Tahun 2004 – 2009.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang RPJP Daerah Jawa Barat Tahun 2005 – 2025.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 tahun 2009 tentang RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2013.

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 tahun 2009 tentang RPJP Daerah Kabupaten Ciamis.

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2009 tentang RPJM Daerah Kabupaten Ciamis.

Ucapan Terimakasih :

Tulisan dalam makalah ini telah dipresentasikan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis yang dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah termasuk DRPD Kabupaten Ciamis. Penulis mengucapkan terimakasih atas kepercayaan yang diberikan Bappeda Kabupaten Ciamis untuk menjadi advisor pembangunan daerah.